

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan berkesinambungan pembangunan suatu bangsa. Sehubungan dengan hal itu menurut (Bashori et al., 2020) Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Sebagaimana digariskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dalam hal ini, masalah pemerintah adalah bagaimana melindungi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak mereka atas pendidikan dasar yang layak.

Salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi jumlah siswa putus sekolah yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang telah ada sejak lama dan hampir pasti akan tetap kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan itu sendiri tidak hanya ditemukan di daerah perbatasan atau pedesaan saja, tetapi kemiskinan juga terjadi di kota-kota metropolitan, bahkan Ibu Kota Jakarta yang merupakan sentral dari mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok negeri pun tidak luput dari masalah kemiskinan (Rintanto, 2019). Kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar salah satunya yaitu pendidikan.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa dan bernegara, namun masih banyaknya terdapat masalah pendidikan yang dihadapi. Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Masalah pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara (Abu Ahmadi, 2007). Salah satu masalah pendidikan yakni biaya pendidikan sekolah dapat dikatakan cukup mahal, khususnya pendidikan formal, mahalnya biaya

Dinda Chairani, 2024

PENGARUH BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT (STUDI SURVEI SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan”. Tetapi dalam implementasi nya masih terdapat siswa-siswa di Ibu Kota Jakarta yang mengalami putus sekolah". Berikut ini daftar tabel jumlah siswa putus sekolah dalam jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Barat.

Tabel 1.1 Jumlah Siswa Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Barat

Jenis Kelamin	Kelas X			Kelas XI			Kelas IX		
	2019	2020	2021	2019	2021	2022	2019	2020	2021
Laki-laki	-	-	-	2	-	-	1	1	-
Perempuan	1	-	3	2	-	-	1	1	-
Jumlah	1	-	3	4	-	-	2	2	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019-2021

Sejalan dengan data BPS, siswa putus sekolah tahun 2019, 2020 dan 2021 di Kota Jakarta Barat, menunjukkan masih banyak faktor yang perlu dan harus diperhatikan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Faktor utama yang menjadi masalah siswa putus sekolah adalah kemiskinan. Di tahun 2020 pada kelas X terlihat tidak adanya siswa putus sekolah, kemudian di tahun 2021 dan 2022 pada kelas XI terlihat juga tidak adanya siswa putus sekolah, dan pada tahun 2021 pada kelas IX terlihat tidak adanya siswa putus sekolah di Kota Jakarta Barat, namun hal ini tetap menjadi sorotan bagi pemerintah, agar terus mempertahankan dan mengembangkan program untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan.

Upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengurangi jumlah siswa putus sekolah khususnya tingkat SMA atau pendidikan menengah di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan berupa Bantuan Biaya Personal Pendidikan kepada siswa kurang mampu yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP). Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta

Dinda Chairani, 2024

PENGARUH BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT (STUDI SURVEI SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pintar (hlm. 1). Menjelaskan bahwa, “Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan”.

Pada saat itu, pemerintah yang dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo menggunakan dana APBD untuk membantu siswa yang tidak mampu membeli peralatan sekolah, biaya gizi dan transportasi ke sekolah. Kemudian terdapat pergantian Gubernur ada beberapa perubahan kebijakan pada era Gubernur Anies Baswedan. Mulanya hanya KJP saja dan tidak dapat ditarik tunai, kemudian digantikan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus, terdapat perubahan dan diperbaharui menjadi Pergub Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Karena sudah dapat ditarik secara tunai, KJP Plus ini diharapkan dapat memperluas jangkauan biaya pendidikan.

Maksud dan tujuan dari KJP Plus ini adalah mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan serta meningkatkan kualitas hasil pendidikan. KJP Plus ini membantu masyarakat berupa pemberian biaya penunjang pendidikan kepada masyarakat tidak mampu agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak hingga tingkat SMA sederajat. Salah satu manfaat dari KJP Plus adalah dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, seperti buku, alat tulis, seragam, biaya transportasi, dan biaya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Namun dalam penggunaannya masih banyak ditemukan pelanggaran dari para penerima yang tidak menggunakan KJP Plus ini sesuai dengan kegunaannya.

Program KJP Plus dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu wilayah yang melaksanakan program KJP Plus adalah wilayah Kota Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat merupakan kota administrasi di bagian barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan memiliki 8 kecamatan yang tersebar di wilayah Jakarta Barat yaitu, Kecamatan Cengkareng, Grogol

Dinda Chairani, 2024

PENGARUH BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT (STUDI SURVEI SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, dan Kembangan. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada para siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat, ditemukan permasalahan adanya watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa yang belum terbentuk dengan baik. Permasalahan yang ditemukan antara lain, yaitu pada tanggung jawab moral, masih terdapat siswa yang menyalahgunakan dana bantuan KJP Plus untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dan pada disiplin diri masih terdapat siswa yang terlambat datang ke sekolah.

KJP Plus sudah diberikan namun adanya karakteristik siswa yang beragam menyebabkan bantuan KJP Plus ada yang dipergunakan dengan baik dan ada juga yang disalahgunakan. Jika peserta didik atau siswa penerima KJP Plus melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan yang ada, maka akan diberikan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. Sementara itu, manusia terutama siswa milenial di masa ini membutuhkan karakter atau sikap warga negara (*civic disposition*) yang baik menjadi salah satu dimensi penting dari *civic competence* (kompetensi warga negara) (Jurs, 2014).

Civic disposition sendiri menjadi dimensi sangat penting bagi seorang siswa karena berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat memiliki sikap dan karakter yang baik. *Civic disposition* membuat seorang warga negara termasuk generasi muda memiliki tanggung jawab moral, menghargai manusia lain di lingkungan sosialnya dan memiliki karakter publik yang baik serta mampu bernegosiasi dan berkompromi (Mulyono, 2017). Untuk itu *civic disposition* akan menciptakan hubungan dan proses interaksi sosial yang positif pada warga negara termasuk pada diri siswa.

Konsep pendidikan kewarganegaraan terdapat tiga komponen utama untuk mencapai warga negara yang baik yaitu (*civic knowledge*) pengetahuan kewarganegaraan, (*civic skills*) kecakapan kewarganegaraan, dan (*civic disposition*) watak kewarganegaraan. Menurut (Rahmat, 2018) *Civic disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan maupun pemerintahan. Dalam mengembangkan *civic*

Dinda Chairani, 2024

PENGARUH BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT (STUDI SURVEI SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disposition, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis untuk menanamkan pada siswa inti dari *civic disposition* yang di dalamnya terkandung karakter privat yaitu tanggung jawab, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga sangat penting, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar (E. Susanto & Komalasari, 2015)

Karakter tanggung jawab dan disiplin diri menjadi sangat penting untuk diterapkan kepada para siswa. Namun permasalahan yang timbul pada saat ini adanya sebagian siswa yang menyalahgunakan bantuan KJP Plus untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan dan tidak diterapkannya karakter tanggung jawab dan juga siswa penerima KJP Plus ini tidak disiplin diri sering datang ke sekolah tidak tepat waktu dan bolos sekolah, terlebih dengan adanya bantuan KJP Plus yang membuat mereka merasa memiliki uang yang cukup banyak. Mereka menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin, sehingga mengakibatkan siswa penerima KJP Plus lalai dalam tanggung jawabnya.

Melalui pembelajaran PPKn siswa dapat membentuk karakter yang baik salah satunya karakter tanggung jawab dan disiplin diri. Sehubungan dengan hal tersebut, (Arliman, 2020) berpendapat bahwa PPKn merupakan salah satu kajian keilmuan yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa di tengah ragamnya perbedaan masyarakat Indonesia. Untuk membentuk warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, PPKn memiliki peran yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk siswa maupun sikap dalam berperilaku sehari-hari, sehingga diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan PPKn untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*) dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya. Dalam konteks ini siswa diajak bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak lari dari tanggung jawab itu (Sulianti et al., 2023). Siswa penerima KJP Plus harus bertanggung jawab terhadap tindakannya yaitu membelanjakan bantuan KJP Plus sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan disiplin dengan peraturan yang ada di sekolah.

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat terkait dengan bantuan KJP Plus dalam upaya membentuk *civic disposition* siswa. Oleh karena itu, karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar terciptanya jiwa yang kompeten dan mempunyai karakter yang baik. *Civic disposition* yang ada dalam diri siswa merupakan komponen penting dari PPKn bertujuan untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap hukum dan bersikap jujur. Namun, saat ini hilangnya karakter kewarganegaraan pada peserta didik disebabkan oleh perkembangan zaman faktor sosial dan lingkungan, sehingga menimbulkan sikap egois karena cara pandang dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri yang membuat peserta didik melakukan kenakalan remaja (Nanda et al., 2022).

Dengan adanya bantuan KJP Plus diharapkan siswa lebih memahami karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) karena pada dasarnya bantuan KJP Plus ini sangat membantu pembentukan karakter siswa. Sehingga keterlibatan siswa penerima bantuan KJP Plus ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TERHADAP CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa fokus permasalahan yang mengarah pada Pengaruh Bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat:

1. Bagaimana pengaruh bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dari pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang terperinci terkait dengan pengaruh Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat. Adapun tujuan secara khusus dari penelitian ini diantaranya:

1. Mengidentifikasi pengaruh bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat.
2. Menganalisis alasan atau faktor yang mempengaruhi siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat dalam pembentukan *civic disposition*
3. Mengeksplorasi hambatan dan upaya dari pelaksanaan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini terbagi ke dalam dua manfaat, yakni teoritis dan praktis. Beberapa manfaat/kegunaan dari penelitian ini termuat dalam bagian-bagian berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat atau kegunaan teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah mengenai pengaruh bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri Kota Jakarta Barat. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada perkembangan bidang keilmuan pendidikan kewarganegaraan dari dimensi *civic disposition* yang berkaitan dengan watak kewarganegaraan. Hal tersebut karena bantuan KJP Plus merupakan program pemerintah DKI Jakarta yang bantuannya harus dipergunakan dengan semestinya dan berpotensi dilakukan oleh warga negara dan berkaitan erat dengan karakter atau sikap daripada warga negara itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi para mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dijadikan penelitian rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai KJP Plus dengan keilmuan kewarganegaraan dan disiplin ilmu lain yang berkaitan sehingga

menghasilkan kajian atau analisis multidisiplin. Dengan demikian, kekayaan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kewarganegaraan akan terus berkembang. Sementara bagi siswa sendiri khususnya pelajar di tingkat SMA, penelitian ini menjadi media literasi melalui proses publikasi hasil riset yang dapat menumbuhkan *awareness* terkait pentingnya aspek karakter dalam penggunaan bantuan KJP Plus.

1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan

Menyambung uraian dari manfaat praktis, manfaat dalam penelitian ini dari segi kebijakan yaitu dengan adanya program KJP Plus dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan terkait dengan kinerja program KJP Plus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu pendidikan bagi siswa yang kurang mampu di Kota Jakarta Barat. Hasil penelitian ini juga menjadi landasan atau acuan untuk dapat merumuskan program atau kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi pembentukan *civic disposition* dengan upaya peningkatan literasi teknologi di lingkungan pendidikan.

1.4.4 Manfaat Segi Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang berguna untuk menumbuhkan kesadaran (*awareness*) tentang bantuan KJP Plus yang banyak terjadi di lingkungan sekolah khususnya di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, siswa dapat lebih bisa mempergunakan bantuan KJP Plus dengan semestinya dan memperoleh pemahaman mengenai KJP Plus dan pengaruhnya terhadap *civic disposition* yang ada dalam diri setiap siswa sehingga para siswa penerima KJP Plus dapat lebih bijaksana dalam menggunakan bantuan KJP Plus.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi yang digunakan sebagai gambaran sangkaan atau perkiraan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan *civic disposition* siswa SMA Negeri di Kota Jakarta Barat saat ini dipengaruhi oleh beragam faktor dan salah satunya adalah bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Selain itu, ada banyak faktor penyebab siswa menyalahgunakan atau melanggar peraturan dari KJP Plus seperti membelanjakan dana bantuan KJP Plus yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, siswa tidak bertanggung jawab atas bantuan KJP Plus, dan siswa yang tidak disiplin akan peraturan di sekolah.

Dinda Chairani, 2024

PENGARUH BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT (STUDI SURVEI SISWA SMA NEGERI KOTA JAKARTA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.6 Struktur Organisasi Penelitian Skripsi

Sistematika penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021. Maka dari itu, Peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi yang berisi:

- 1) **BAB I PENDAHULUAN:** Berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.
- 2) **BAB II KAJIAN PUSTAKA:** Bab ini berisi mengenai konsep-konsep atau teori-teori utama serta pendapat ahli yang relevan atau berkaitan dengan bidang yang diteliti atau dikaji, penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- 3) **BAB III METODE PENELITIAN:** Bab ini berisikan desain penelitian yang digunakanm rincian mengenai lokasi, objek dan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.
- 4) **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN:** Berisi terkait temuan penelitian berdasarkan hasil olah dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya disesuaikan dengan urutan rumusan penelitian dan pembahasan temuan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 5) **BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI:** Berisi mengenai penyampaian penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang juga sekaligus mengajukan hal-hal penting yang bisa dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Terdapat dua alternatif cara penelitian kesimpulan, yakni butir demi butir dan uraian padat.